

ABSTRAK

Dewasa ini masalah pertanahan belum dapat dipecahkan sebagaimana yang diharapkan, bahkan cenderung semakin rumit sejalan dengan meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat itu sendiri sehingga dibutuhkan usaha-usaha penataan dalam hal penguasaan tanah. Salah satu kendala yang sangat signifikan dan mendasar dalam melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan tanah adalah belum tersedianya data yang faktual dan aktual, baik dari sisi obyek maupun subyek *landreform*. Berdasarkan kajian ini, pengentasan kemiskinan melalui pola redistribusi tanah sangat terbantu dengan pemanfaatan teknologi SIG mengingat kemampuan dan kapasitas analisa yang bisa dimanfaatkan mampu menangani data dalam kuantitas yang hampir tak terhingga. Dengan melakukan tumpang-tindih kedua jenis peta tematik (potensi obyek dan potensi subyek), maka diperoleh indikasi potensi obyek-subyek redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam “satuan desa”

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Geografis, Masyarakat Petani

DAFTAR PUSTAKA

Glewee, Paul. 1990. Improving data an poverty in the third world: The world bank's living standars measurement study. The World Bank.

Todaro, Michael P. 1989. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.

World development report. 1990. Oxford university press, Washington DC.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam <[http://ciptakarya.pu.go.id/_pbl/pustaka/GRN/UU/UU_5_1960_TTG%20PERATURAN%20DASAR%20POKOK-POKOK%20AGRARIA%20\(L.N.%201960.PDF](http://ciptakarya.pu.go.id/_pbl/pustaka/GRN/UU/UU_5_1960_TTG%20PERATURAN%20DASAR%20POKOK-POKOK%20AGRARIA%20(L.N.%201960.PDF)> diakses 24 Januari 2007

Peraturan pemerintah No. 224 TAHUN 1961. Dalam <<http://dokumen.deptan.go.id/doc/BDD2.nsf/e22371ebef43e5444725666100335da0/b59175ebe92cc89fc7256d9e0014dab1?OpenDocument>> diakses 24 Januari 2007.